ABSTRAK

Diah Puji Lestari, 2015, *Problematika Pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto (Studi tentang Ganti Rugi Lahan Masyarakat di Desa Tampingmojo, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang),* Skripsi Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya.

Kata Kunci : problematika, jalan tol, dan ganti rugi

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem ganti rugi lahan masyarakat yang terkena ruas pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto di Desa Tampingmojo Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang. Dan bagaimana problematika yang terjadi akibat sistem ganti rugi lahan masyarakat yang terkena ruas pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto di Desa Tampingmojo Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang.

Metode yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian *grounded theory*. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam melihat problematika pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto mengenai ganti rugi lahan masyarakat di Desa Tampingmojo adalah teori konflik (wewenang dan posisi dalam masyarakat serta dialektika konflik kekuasaan) Ralf Dahrendorf.

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa; (1) Wewenang dan posisi dalam masyarakat antara panitia pengadaan tanah untuk pambangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto dan masyarakat Tampingmojo memiliki perbedaan. Yakni panitia pengadaan tanah memiliki wewenang dan posisi yang lebih besar daripada masyarakat dalam proses pembangunan. Hal ini dikarenakan proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum. Sehingga masyarakat harus mengikuti segala prosedur yang ditetapkan. Bagi warga yang belum bersedia menerima uang ganti rugi harus mengikuti segala prosedur yang tetapkan oleh pemerintah. Namun prosedur tersebut tidak dilaksanakan oleh empat warga yang menolak UGR (Uang Ganti Rugi). (2) Dialektika konflik kekuasaan antara panitia pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto dan masyarakat Tampingmojo dilatarbelakangi oleh beberapa kepentingan yang berbeda. Yakni panitia pengadaan tanah untuk pembangunan menjalankan kepentingan-kepentingan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan masyarakat hanya bisa tunduk pada kekuasaan pemerintah yang sedang menjalankan kepentingan masing-masing. Sehingga timbul permasalahan antara masyarakat dan pemerintah yang disebabkan oleh perbedaan kekuasaan yang dimiliki. Pemerintah kecewa dengan tindakan empat warga yang tidak mengikuti prosedur. Apabila mereka bersedia mengikuti prosedur maka UGR (Uang Ganti Rugi) akan mengalami kenaikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id